

RITUAL ASYURA SEBAGAI SARANA PERLAWANAN MASYARAKAT SYIAH DI IRAN (1941-1979)

Alif Fadlil Nurfitrianto^{1*}, Suryo Ediyono²

^{1, 2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Aliffadlil20@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Kata

Kunci:

Ashura,
Shia, Iran, Reza
Pahlavi, ritual
resistance,
Islamic
Revolution,
symbolic power.

This study examines how the Ashura ritual, a central religious practice in Iran's Shia community, evolved into a form of socio-political resistance to the authoritarian regime of Muhammad Reza Pahlavi (1941-1979). The modernization and secularization policies introduced through the White Revolution significantly reshaped Iran's social structure and marginalized religious institutions. In this context, the regime began to see Ashura as a potential political threat and sought to suppress public expression. However, the repressive measures inadvertently intensified Shia resistance, encouraging the rearticulation of Karbala symbolism as a narrative of resistance to injustice. Using a descriptive qualitative approach through desk research and analyzing the data using Miles and Huberman's interactive model, this study found that ritual forms such as rowzeh, sinehzani, ta'ziyeh, and dasteh azadari not only reinforce religious identity but also serve as discursive platforms to resist state hegemony. By harnessing symbolic power and collective spirituality, Iranians turned Ashura into an effective medium of mass mobilization that ultimately challenged the legitimacy of the Pahlavi regime and paved the way for the Islamic Revolution in 1979.

This is an
open access
article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Copyright
© 2025 Authors
and Albuchuts

PENDAHULUAN

Iran merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika budaya, sosial, dan politik di kawasan Timur Tengah. Sejak berdirinya Dinasti Safawiyah pada abad ke-16, paham Islam Syiah telah menjadi fondasi utama identitas nasional Iran. Sepanjang abad ke-20, khususnya pada masa pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi (1941–1979), negara ini mengalami modernisasi besar-besaran yang disertai dengan kebijakan sekularisasi agresif. Modernisasi tersebut membawa dampak positif dalam bidang infrastruktur dan pendidikan, tetapi juga memunculkan ketegangan sosial akibat marginalisasi peran ulama dan tradisi keagamaan dalam kehidupan publik, khususnya di kalangan masyarakat Syiah (Fatimah, 2007).

Salah satu praktik keagamaan yang tetap bertahan kuat di tengah perubahan tersebut adalah ritual Asyura, yaitu peringatan atas kesyahidan Imam Husain di Karbala. Ritual ini tidak hanya menjadi ekspresi keagamaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolik seperti keadilan, pengorbanan, dan perjuangan melawan tirani (Mohammadi, 2013). Bentuk-bentuknya meliputi pembacaan kisah Karbala (*rowzeh*), pemukulan dada (*sinehzani*), arak-arakan duka (*daste azadari*), hingga pertunjukan teatrikal (*ta'ziyeh*), yang memperkuat kohesi sosial dan kesadaran kolektif masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi yang otoriter, ritual Asyura mengalami perubahan makna. Pemerintah memandang praktik ini sebagai potensi ancaman politik, sehingga berupaya membatasi pelaksanaannya (Partow, 2014). Meskipun demikian, upaya represif tersebut justru mendorong masyarakat Syiah untuk mengartikulasikan resistensi melalui ritual Asyura, menjadikannya alat mobilisasi massa dan sarana delegitimasi kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Asyura tidak sekadar menjadi praktik keagamaan, tetapi juga instrumen perlawanan sosial-politik yang signifikan menjelang Revolusi Islam 1979.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas ritual Asyura dari sisi teologis, budaya, maupun sosiologis. Namun, belum ada studi yang secara komprehensif menyoroti bagaimana ritual ini difungsikan sebagai strategi perlawanan terhadap rezim Pahlavi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan ritual Asyura sebagai sarana pembentukan gerakan sosial-politik dalam konteks Iran modern. Secara khusus, kajian ini akan menjawab dua rumusan masalah: (1) Bagaimana kebijakan represif Muhammad Reza Pahlavi mendorong penggunaan ritual Asyura sebagai bentuk perlawanan masyarakat Syiah? dan (2) Bagaimana ritual Asyura berperan dalam membentuk wacana perlawanan terhadap kekuasaan otoriter pada masa tersebut?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana ritual Asyura mengalami transformasi menjadi sarana perlawanan terhadap rezim otoriter Muhammad Reza Pahlavi di Iran. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna simbolik dan fungsi sosial-politik dari praktik keagamaan dalam konteks historis yang kompleks. Penelitian ini tidak menggunakan manipulasi variabel, melainkan berfokus pada pengamatan dan interpretasi terhadap fenomena sosial sebagaimana adanya melalui analisis dokumen dan literatur.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah karya-karya akademik utama seperti *The Martyrs of Karbala* karya Kamran Aghaie dan *A History of Modern Iran* oleh Ervand Abrahamian, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, tesis, dan artikel sejarah yang relevan. Seluruh sumber dipilih secara purposif berdasarkan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai hubungan antara ritual Asyura dan dinamika politik pada masa pemerintahan Pahlavi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan memilah informasi yang sesuai fokus penelitian, penyajian disusun dalam bentuk narasi tematik yang terstruktur, dan kesimpulan ditarik untuk memahami bagaimana praktik Asyura berkontribusi dalam membentuk wacana perlawanan terhadap kekuasaan otoriter di Iran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Represif Pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi

Kebijakan represif yang diterapkan oleh Muhammad Reza Pahlavi memainkan peran sentral dalam mempertahankan stabilitas kekuasaan monarkinya, namun pada saat yang sama memicu gelombang resistensi yang meluas di kalangan masyarakat Iran, khususnya komunitas Syiah. Dalam upaya mempertahankan hegemoni negara, Reza Pahlavi menjalankan berbagai strategi kontrol sosial, politik, dan ideologis yang tidak hanya menyasar oposisi politik, tetapi juga merambah institusi keagamaan, budaya, dan ruang publik. Bagian ini akan menguraikan lima kebijakan utama yang merepresentasikan wajah otoritarianisme rezim Pahlavi dan dampaknya terhadap munculnya perlawanan yang berpuncak pada Revolusi Islam 1979.

1. Pembentukan Badan Keamanan Negara (SAVAK)

Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan SAVAK (Organisasi Keamanan dan Intelijen Nasional) memainkan peran kunci dalam menopang kekuasaan otoriter Reza Pahlavi. Lembaga ini bukan hanya bertugas menjaga stabilitas negara, tetapi secara aktif membentuk sistem pengawasan sosial yang meluas dan represif. Temuan utama menunjukkan bahwa strategi kekuasaan yang diterapkan melalui SAVAK sejalan dengan konsep Michel Foucault tentang kekuasaan yang bersirkulasi dalam jaringan sosial dan bukan semata-mata terpusat di negara.

SAVAK tidak hanya mengawasi aktor-aktor politik oposisi, tetapi juga menyusup ke institusi-institusi sipil seperti pendidikan, media, dan bahkan kehidupan pribadi masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dipraktikkan melalui kontrol terhadap pengetahuan, pendefinisian ancaman, dan pembentukan wacana resmi yang membatasi suara-suara alternatif. Pengetahuan yang dikumpulkan oleh SAVAK tentang siapa yang dianggap berbahaya dan bagaimana masyarakat berpikir digunakan untuk menciptakan ketakutan yang sistematis, yang pada gilirannya memperkuat dominasi negara. Ini membuktikan tesis Foucault bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling memperkuat dan saling mereproduksi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa tindakan represif bukan hanya menghasilkan kepatuhan, tetapi juga menyemai benih perlawanan. Penekanan terhadap kelompok Islam Syiah, khususnya, justru mendorong transformasi gerakan mereka dari oposisi reformis menjadi gerakan revolusioner. Dalam konteks ini, Syiah tidak hanya menjadi identitas keagamaan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan simbolik-politik yang memobilisasi massa melawan rezim. Wacana keagamaan Syiah terutama narasi tentang pengorbanan dan ketidakadilan yang tertanam dalam peringatan Asyura dimobilisasi sebagai strategi perlawanan terhadap represi negara.

Temuan ini berbeda dengan sebagian literatur sebelumnya yang cenderung melihat SAVAK semata-mata sebagai lembaga intelijen negara modern yang dibentuk untuk menangkal komunisme (Jerry D. Gray, 2007). Penelitian ini menekankan bahwa SAVAK, melalui penetrasi sosialnya yang luas dan produksi wacana, berfungsi sebagai alat utama negara dalam menginternalisasi kekuasaan ke dalam tubuh sosial. Namun, efektivitas kontrol ini justru kontraproduktif dalam jangka panjang. Ketergantungan rezim Pahlavi pada kekerasan menciptakan resistensi yang lebih radikal dan kolektif, menunjukkan bahwa kekuasaan yang menindas selalu berpotensi melahirkan tandingannya.

2. Kebijakan Modernisasi Melalui Revolusi Putih

Kebijakan modernisasi yang diluncurkan Muhammad Reza Pahlavi melalui Revolusi Putih pada 1963 yaitu terdapat enam poin utama Revolusi Putih, termasuk reformasi agraria, nasionalisasi hutan, dan pemberian hak pilih kepada perempuan, menjadi instrumen modernisasi negara. Kebijakan revolusi ini menghasilkan dampak struktural yang signifikan terhadap dinamika sosial-politik Iran. Program ini bertujuan mengurangi dominasi kelompok feodal dan memperlemah peran tradisional ulama dalam politik Iran (Abrahamian Ervand, 2008).

Hasil utama menunjukkan bahwa, secara formal, program ini berhasil memperluas akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sosial. Namun, di sisi lain, kebijakan

ini juga melemahkan posisi institusi keagamaan dan memperbesar ketimpangan sosial. Pembatasan terhadap peran ulama, termasuk pencabutan hak legislasi keagamaan dan eksklusi dari parlemen, memperlihatkan adanya agenda politik terselubung dalam reformasi tersebut (Zein et al., 2024). Reformasi agraria yang dijalankan tidak hanya mengubah struktur kepemilikan tanah tetapi juga membentuk kelas sosial baru, seperti petani bebas dan pekerja urban. Perubahan ini membuka ruang mobilisasi sosial yang sebelumnya tertutup karena relasi patronase feodal (Abrahamian Ervand, 2008). Namun, implementasi prinsip trickle-down dalam kebijakan ekonomi justru memperbesar kesenjangan antara elite dan masyarakat bawah. Hasil eksploitasi minyak yang seharusnya mendukung pembangunan inklusif malah terkonsentrasi di tangan pengusaha dan elite negara.

Konsekuensi lain dari kebijakan ini adalah meningkatnya angka urbanisasi akibat kerusakan sistem pertanian tradisional. Banyak masyarakat desa bermigrasi ke kota karena kehilangan akses produktif terhadap lahan dan pekerjaan, yang selanjutnya memperkuat basis massa bagi gerakan oposisi urban (Pramono, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa program modernisasi tidak mampu menjangkau kesejahteraan masyarakat rural secara merata. Kebijakan pemberian hak pilih kepada perempuan juga menciptakan kontroversi besar. Meskipun terlihat progresif, kebijakan ini diluncurkan dalam konteks sistem pemilu yang tidak demokratis dan memicu penolakan keras dari kalangan konservatif, terutama ulama di kota Qom (Abrahamian Ervand, 2008). Tanggapan represif dari negara atas protes tersebut memperburuk relasi antara pemerintah dan institusi keagamaan.

Revolusi Putih lebih banyak menciptakan disrupsi terhadap struktur sosial dan budaya Iran dibandingkan mewujudkan stabilitas. Alih-alih memperkuat legitimasi rezim, kebijakan ini justru mempercepat krisis kepercayaan publik, terutama karena ketergantungan terhadap dukungan asing, seperti Amerika Serikat, dan karakter otoriter negara (Zein et al., 2024). Dengan demikian, reformasi yang dimaksudkan sebagai fondasi modernisasi berubah menjadi pemicu utama bagi lahirnya kekuatan oposisi yang kemudian berpuncak pada Revolusi Islam 1979.

3. Penangkapan dan Pengasingan Ulama

Pada tahun 1963, Ayatollah Ruhollah Khomeini muncul sebagai simbol utama perlawanan terhadap kebijakan modernisasi Reza Pahlavi, terutama setelah peluncuran Revolusi Putih yang mencakup pemberian hak pilih kepada perempuan. Khomeini menilai kebijakan tersebut mengancam nilai-nilai Islam dan memperkuat dominasi asing serta korupsi negara. Kritik kerasnya pertama kali disampaikan secara terbuka pada 3 Juni 1963 di kota Qom, bertepatan dengan Hari Asyura, di mana ia menyamakan Reza Pahlavi dengan Yazid sebagai simbol kezaliman terhadap Islam (Fauzi, 2011).

Reaksi keras terhadap ceramah ini adalah penangkapan Khomeini oleh SAVAK yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Bentrokan dengan aparat menyebabkan ratusan korban tewas dan menunjukkan semakin kuatnya dukungan terhadap Khomeini. Setelah dibebaskan, ia kembali mengecam perjanjian Kapitulasi 1964 yang dianggap merendahkan martabat bangsa Iran dan tunduk pada Amerika Serikat (Sahimi, 2009).

Pengaruh Khomeini yang kian luas membuat rezim kembali menangkap dan mengasingkannya ke Turki, kemudian ke Najaf, Irak. Di pengasingan, Khomeini tetap aktif menyebarkan pemikirannya melalui kaset pidato dan tulisan yang dikirim ke Iran, membangun jaringan perlawanan berbasis doktrin Islam dan simbol Asyura (Fauzi, 2011). Upaya propaganda rezim, seperti penerbitan artikel fitnah pada 1978 di surat kabar *Ettela'at*, justru memicu kemarahan publik dan memperkuat solidaritas terhadapnya (Abrahamian Ervand, 2008).

Secara teoritik, perlawanan Khomeini mencerminkan konsep *power/knowledge* Michel Foucault, di mana pengetahuan menjadi alat produksi kekuasaan tandingan. Ceramah, kaset, dan simbol keagamaan berperan sebagai wacana perlawanan terhadap dominasi negara. Alih-alih membungkam, tindakan represif negara justru menciptakan bentuk resistensi yang lebih kuat, menjadikan Khomeini simbol utama revolusi Islam Iran 1979.

4. Pembatasan Peringatan Ritual Asyura

Pada awal pemerintahannya, Shah Mohammad Reza Pahlavi masih memberi kebebasan atas pelaksanaan ritual Asyura sebagai bagian dari tradisi Syiah. Namun, situasi berubah drastis setelah Ayatollah Khomeini memanfaatkan momentum Asyura 1963 untuk mengkritik keras rezim, yang kemudian memicu demonstrasi besar-besaran. Pemerintah mulai melihat Asyura sebagai ancaman politis dan menerapkan kebijakan represif untuk membatasi ruang keagamaan, termasuk pelarangan khutbah bernada politis dan pengawasan ketat terhadap ulama (Khomeini, 1995).

Meskipun demikian, masyarakat tetap menjalankan peringatan Asyura dalam bentuk terbatas di masjid dan *hussainiyah*. Secara bertahap, para ulama menyisipkan pesan-pesan politis dalam ritual keagamaan seperti pembacaan makhtal, sehingga Asyura menjadi alat penyadaran politik dan simbol perlawanan terhadap rezim (Fatimah, 2007).

Dalam kerangka pemikiran Foucault, tindakan negara untuk membatasi ruang keagamaan ini mencerminkan bentuk kekuasaan yang bekerja melalui kontrol atas wacana. Namun, resistensi tetap muncul karena masyarakat menggunakan pengetahuan keagamaan untuk memproduksi narasi alternatif yang menentang hegemoni negara. Asyura kemudian berkembang menjadi ruang wacana tandingan, di mana solidaritas dan semangat perjuangan semakin menguat, membuktikan bahwa kekuasaan selalu diikuti oleh potensi resistensi.

5. Pembentukan Sistem Partai Tunggal (Partai Rastakhiz)

Pada tahun 1975, Reza Pahlavi membentuk sistem partai tunggal dengan mendirikan Partai Rastakhiz sebagai upaya mengontrol politik dan mengintegrasikan rakyat ke dalam sistem negara. Namun, langkah ini justru memperkuat oposisi, terutama dari kalangan pedagang tradisional (*bazaar*) dan ulama, yang melihatnya sebagai bentuk pemaksaan ideologi yang bertentangan dengan Islam dan nilai-nilai sosial masyarakat Iran (Pramono, 2017).

Penolakan terhadap Rastakhiz memuncak dalam protes keras dari pelajar agama dan ulama, yang dibalas pemerintah dengan represi termasuk penutupan Madrasah Fayzieh dan penahanan paksa pelajar. Fatwa-fatwa keagamaan menolak legalitas partai tersebut dan memperkuat legitimasi perlawanan (Abrahamian Ervand, 2008).

Tragedi nasional seperti pembakaran Cinema Rex pada 19 Agustus 1978, yang menewaskan lebih dari 400 orang, semakin memicu kebencian publik terhadap rezim. Meskipun pemerintah menyalahkan kaum Islamis, banyak pihak percaya bahwa aparat negara terlibat dalam insiden tersebut sebagai bentuk sabotase terhadap revolusi. Puncaknya terjadi pada *Black Friday* (8 September 1978), saat ribuan demonstran ditembak mati oleh pasukan militer. Peristiwa ini memperluas gelombang protes dan memperkuat kesatuan antara kelompok Islamis dan sekuler dalam menentang Syah (Mundzir, 2020).

Dalam konteks kekuasaan, pendekatan Reza Pahlavi mencerminkan upaya memonopoli wacana politik dan menyingkirkan identitas keagamaan rakyat. Namun, sebagaimana dikatakan Michel Foucault, di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi. Resistensi terhadap Rastakhiz dan represi negara menjadi bentuk perlawanan produktif yang menumbuhkan solidaritas dan kesadaran kolektif, serta mempercepat kehancuran legitimasi rezim.

Reza Pahlavi akhirnya melarikan diri pada 16 Januari 1979 setelah kehilangan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dan militer. Khomeini pulang dari pengasingan pada 1 Februari 1979 dan segera mengambil alih kekuasaan dengan dukungan penuh rakyat. Terbentuklah Republik Islam Iran, yang menandai berakhirnya dinasti Pahlavi dan permulaan era pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam (Wagner, 2010).

Ritual Asyura sebagai Sarana Perlawanan terhadap Reza Pahlavi

Dalam konteks represi politik dan marginalisasi nilai-nilai keagamaan selama era Muhammad Reza Pahlavi, ritual Asyura tidak hanya dipertahankan sebagai bagian dari warisan spiritual, tetapi juga mengalami perluasan makna yang signifikan. Asyura tidak lagi sekadar menjadi peringatan keagamaan atas tragedi Karbala, melainkan berkembang menjadi medium

ekspresi sosial-politik yang sarat muatan simbolik. Di tengah tekanan rezim yang berusaha menekan pengaruh ulama dan menghapuskan praktik keagamaan tradisional dari ruang publik, ritual Asyura justru menjadi ruang aman sekaligus panggung strategis bagi masyarakat Syiah untuk menyuarakan keresahan kolektif mereka.

1. Rowzeh Khavani sebagai Ceramah Keagamaan

Rowzeh Khavani adalah tradisi pembacaan narasi kesyahidan Imam Husain dalam tragedi Karbala, yang berakar dari karya *Rowzat al-Shohada* dan memiliki nilai spiritual, emosional, sekaligus politis. Dalam konteks pemerintahan otoriter Reza Pahlavi, Rowzeh mengalami transformasi menjadi medium kritik sosial-politik terselubung. Melalui simbolisme Karbala, ulama seperti Ayatollah Khomeini mengonstruksi narasi perlawanan terhadap kekuasaan represif, menyamakan Shah dengan sosok Yazid (Sahimi, 2009).

Pidato Khomeini pada Asyura 1963 yang menggunakan bentuk Rowzeh memicu Gerakan 15 Khordad dan demonstrasi besar di Iran. Peristiwa ini mencerminkan kekuatan simbolik Karbala dalam membentuk solidaritas politik dan memobilisasi massa, sejalan dengan gagasan Michel Foucault bahwa kekuasaan selalu disertai resistensi yang dibentuk melalui wacana (Foucault, 1990).

Rowzeh menjadi arena pertarungan makna, di mana komunitas Syiah menggunakan narasi penderitaan Husain untuk merespons represi negara. Ceramah-ceramah keagamaan, rekaman kaset, dan pamflet memperkuat penyebaran diskursus alternatif yang menggugat legitimasi negara (Khomeini, 1995). Bagi Khomeini, semangat Karbala adalah senjata moral dalam jihad melawan tirani, bukan kekuatan militer, melainkan kesiapan untuk berkorban demi kebenaran. Dengan demikian, Rowzeh Khavani tidak hanya menjadi ritual spiritual, tetapi juga wahana produksi pengetahuan, pembentukan kesadaran kolektif, dan penggerak perlawanan sosial yang turut membentuk fondasi Revolusi Islam Iran 1979 (Sahimi, 2009).

2. Majelis Ta'zīyeh sebagai Teater Resistensi

Ta'zīyeh, sebagai bentuk teater religius khas tradisi Syiah Iran, awalnya berfungsi untuk mengenang tragedi Karbala secara spiritual dan emosional. Imam Husain diposisikan sebagai simbol keberanian dan keadilan, sementara Yazid melambangkan tirani dan ketidakadilan. Namun, pada dekade 1960–1970-an, *ta'zīyeh* mengalami transformasi menjadi wahana resistensi simbolik terhadap kekuasaan otoriter Muhammad Reza Pahlavi.

Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, kekuasaan tersebar dalam praktik sosial dan budaya, bukan hanya dimonopoli oleh negara. Maka, *ta'zīyeh* yang dihidupi melalui majelis duka, syair marsiyah, dan pertunjukan teatral berfungsi sebagai ruang produksi wacana alternatif yang menantang hegemoni negara. Simbolisme Karbala dalam *ta'zīyeh* menjadi media pembentukan kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan yang berlangsung dalam konteks politik kontemporer Iran (Foucault, 1972).

Aktivis dan ulama revolusioner menyisipkan pesan-pesan politik dalam lakon *ta'zīyeh* tanpa menyebut nama Shah secara eksplisit, namun dengan membangun analogi antara kezaliman Yazid dan tindakan represif Rezim Pahlavi. Proses ini menimbulkan *counter-discourse* yang mendorong publik untuk mengidentifikasi diri dengan Imam Husain dan menolak kekuasaan yang represif (Aghaie, 2004).

Merespons potensi subversif ini, pemerintah Pahlavi melakukan upaya depolitisasi *ta'zīyeh* mengubah pementasan menjadi sekadar seni pertunjukan, mendorong tema-tema sekuler, dan bahkan mengkomersialkannya. Namun, justru usaha ini memperlihatkan ketakutan negara terhadap kekuatan simbolik *ta'zīyeh* sebagai instrumen mobilisasi sosial-politik (Foucault, 1990). Festival Seni yang digelar antara 1965–1977 memperbolehkan pementasan *ta'zīyeh* dengan sensor ketat, hingga akhirnya dilarang pada bulan Muharram dan Safar 1977 karena dinilai terlalu berisiko politis. Larangan ini menegaskan bahwa *ta'zīyeh* tidak dapat dipisahkan dari struktur budaya dan spiritual masyarakat Syiah, serta telah menjadi bagian integral dari bahasa

perlawanan kolektif.

Menurut Nematollahi Mahani (2013), selama menjelang Revolusi Islam, *ta'ziyeh* berkembang dari ritual keagamaan menjadi alat mobilisasi sosial-politik yang memperkuat solidaritas rakyat. Dialog, kostum, dan simbol dalam pementasan tidak hanya menghidupkan sejarah, tetapi juga mengaktifkan *resistance memory* terhadap tirani, menjadikan masyarakat secara simbolik menolak legitimasi kekuasaan negara (Nematollahi Mahani, 2013).

Dengan demikian, *ta'ziyeh* tidak hanya mempertahankan memori spiritual Karbala, tetapi menjadi alat pendidikan politik dan wacana tandingan yang efektif. Rezim Pahlavi gagal menghapus muatan politis dalam *ta'ziyeh* karena nilai-nilai yang dikandungnya telah mengakar dalam identitas dan kesadaran publik. Seni dan agama bertemu dalam *ta'ziyeh* untuk membentuk perlawanan kolektif yang mendorong perubahan sosial dan menjadi bagian dari landasan Revolusi Islam 1979.

3. Penggunaan Slogan Asyura

Slogan "Setiap Hari adalah Asyura, dan Setiap Tempat adalah Karbala" (*Har rooz Asyura, har ja Karbala*) menjadi salah satu ekspresi paling signifikan dari transformasi simbolisme religius menjadi alat perjuangan politik dalam Revolusi Islam Iran. Diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Ayatollah Khomeini, slogan ini menjelma dari sekadar ungkapan spiritual menjadi kerangka ideologis dan aksi revolusioner yang menjiwai perlawanan terhadap rezim Muhammad Reza Pahlavi (Khomeini, 1995).

Slogan ini menekankan bahwa Asyura bukan sekadar tragedi historis tahun 680 M, tetapi sebuah prinsip moral universal. Karbala dipahami bukan lagi sebagai lokasi geografis, melainkan sebagai medan simbolik di mana konflik antara keadilan (*haqq*) dan kezaliman (*batil*) terus terjadi sepanjang zaman. Khomeini secara eksplisit menolak pemaknaan pasif atas Asyura sebagai semata-mata momen ratapan. Ia menegaskan bahwa semangat pengorbanan Imam Husain harus direfleksikan dalam bentuk perjuangan aktif melawan penindasan, menjadikan slogan ini sebagai "perintah untuk bertindak" dalam konteks perjuangan kontemporer (Khomeini, 1995).

Dalam kerangka Michel Foucault, slogan ini berperan sebagai wacana tandingan (*counter-discourse*) terhadap narasi hegemonik negara. Ia membentuk sebuah *regime of truth* baru, di mana simbol-simbol religius tidak hanya dijadikan pengingat sejarah, tetapi sebagai basis pengetahuan dan kekuasaan alternatif yang memobilisasi massa. Melalui masjid, ceramah, pamflet, dan aksi-aksi publik, simbolisme Asyura menyebar dalam ruang sosial dan menjadi struktur makna yang menyaingi otoritas negara (Foucault, 1980).

Khomeini membingkai rezim Pahlavi sebagai representasi kontemporer Yazid penindas moral dan musuh Islam. Sebaliknya, rakyat diposisikan sebagai *pengikut Husain*, yang secara spiritual dan moral wajib melanjutkan perjuangan. Dalam pidatonya, Khomeini menyatakan bahwa "Setiap individu yang mencintai keadilan adalah bagian dari pasukan Husain," menjadikan slogan ini tidak hanya alat agitasi, tetapi juga perangkat pembentukan identitas politik-religius kolektif (Khomeini, 1995).

Simbol ini kemudian bermaterialisasi dalam berbagai bentuk praktik religius dan publik. Salat berjamaah, pembacaan syair Asyura, dan aksi demonstrasi tidak lagi bersifat apolitis. Semuanya menjadi ritual sakral yang dibingkai sebagai bagian dari *jihad fi sabilillah*. Ruang-ruang publik dan tubuh umat pun dimobilisasi sebagai arena sakral perlawanan. Dalam perspektif Foucault, hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga produktif mengatur tindakan, membentuk identitas, dan menciptakan realitas sosial melalui praktik-praktik simbolik (Foucault, 1990).

Secara praksis, slogan ini memiliki kekuatan performatif dalam menyatukan gerakan perlawanan. Peristiwa *Black Friday* (8 September 1978), yang memicu gelombang protes lebih besar, ditafsirkan oleh Khomeini sebagai "tragedi berdarah yang menghasilkan buah kemenangan." Dalam hal ini, penderitaan tidak dilihat sebagai kekalahan, tetapi sebagai alat

spiritual dan politik untuk membangkitkan kesadaran rakyat, membingkai narasi kemenangan melalui pengorbanan, sebagaimana Imam Husain di Karbala (Khomeini, 1995).

Lebih dari sekadar narasi revolusioner, slogan ini berfungsi sebagai instrumen artikulasi spiritual-politik yang menyatukan sejarah, agama, dan perjuangan sosial. Ia menjadi medan di mana memori kolektif Karbala dihidupkan kembali dalam konteks modern untuk membentuk solidaritas dan militansi melawan ketidakadilan. Dalam kerangka *power/knowledge* Foucault, pengetahuan keagamaan yang termaterialisasi melalui slogan ini tidak netral, tetapi menjadi bagian dari strategi kuasa yang dijalankan masyarakat untuk menantang dan menyaingi kekuasaan negara (Siregar, 2021).

Akhirnya, slogan “Setiap Hari adalah Asyura, dan Setiap Tempat adalah Karbala” menjadi lebih dari sekadar kata-kata. Ia adalah *modus operandi* revolusi sebuah semangat aktif, kerangka etis, dan mekanisme mobilisasi yang memungkinkan agama menjadi kekuatan transformasi sosial. Simbol ini terus hidup dalam kesadaran kolektif rakyat Iran, membuktikan bahwa mitologi religius dapat menjadi fondasi praksis politik dalam melawan hegemoni kekuasaan dan mewujudkan perubahan radikal.

4. Shinehzani sebagai Alat Ekspresi Perlawanan Politik

Shinehzani, atau ritual pemukulan dada yang dilakukan dalam peringatan Asyura, merupakan salah satu ekspresi paling khas dalam tradisi Syiah di Iran. Secara simbolis, ritual ini mencerminkan kesedihan mendalam dan solidaritas terhadap penderitaan Imam Husain dan para syuhada Karbala. Namun, dalam konteks sejarah sosial-politik Iran, khususnya menjelang Revolusi Islam 1979, Shinehzani tidak hanya menjadi ekspresi duka spiritual, melainkan berkembang menjadi medium resistensi kolektif terhadap kekuasaan otoriter.

Transformasi ini menjadi nyata ketika Rezim Mohammad Reza Pahlavi mencoba membatasi ruang-ruang ekspresi religius yang dinilai berpotensi membangkitkan perlawanan. Rezim melihat ritual-ritual Syiah, termasuk Shinehzani, sebagai ancaman bagi proyek sekularisasi dan modernisasi negara. Namun, pembatasan ini justru menumbuhkan makna politis baru: simbolisme Karbala dimobilisasi untuk menggambarkan penderitaan rakyat Iran di bawah tirani Shah. Dalam pidato-pidatonya, Ayatollah Khomeini secara eksplisit mengidentifikasi Shah sebagai “Yazid modern”, sehingga Shinehzani menjadi ritual perlawanan spiritual yang mengandung legitimasi politis (Khomeini, 1995).

Secara performatif, Shinehzani dilakukan secara massal dan ritmis, sering kali diiringi syair-syair duka dan tabuhan genderang. Namun, sejak akhir 1970-an, prosesi ini diselingi dengan seruan politik seperti “Marg bar Shah” (Matilah Shah), menjadikannya arena mobilisasi massa yang kuat. Prosesi Asyura tahun 1978, misalnya, menjadi demonstrasi publik terbesar menjelang jatuhnya Reza Pahlavi, menandakan pergeseran ritual religius menjadi ekspresi politik yang militan.

Pasca-revolusi, simbolisme Shinehzani diadopsi oleh negara baru untuk memperkuat ideologi Republik Islam. Narasi pengorbanan Karbala tetap digunakan, namun kini dibingkai untuk mendukung legitimasi kekuasaan negara. Praktik yang dulunya mencerminkan resistensi terhadap negara, kini menjadi bagian dari instrumen negara itu sendiri. Hal ini memunculkan kritik bahwa ritual-ritual seperti Shinehzani mulai kehilangan makna otentiknya dan dipakai sebagai alat propaganda kekuasaan.

Meski demikian, seperti yang dikemukakan Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dan menyebar. Dalam konteks Shinehzani, relasi kuasa tidak bersifat satu arah. Negara memang menggunakan simbol Karbala untuk mengukuhkan hegemoni, namun masyarakat pun dapat merebut kembali simbol tersebut sebagai alat ekspresi protes. Ritual Shinehzani menjadi arena di mana *power/knowledge* bekerja secara timbal balik, menciptakan ruang interpretasi baru dan wacana tandingan yang menantang dominasi negara (Foucault, 1980).

Dengan demikian, Shinehzani adalah praktik simbolik yang menyimpan kekuatan ganda: ia

menjadi alat legitimasinya negara sekaligus potensi bagi resistensi masyarakat. Dalam konteks Iran, ritual ini telah bertransformasi dari praktik spiritual menjadi bahasa politik yang hidup, yang memungkinkan rakyat mengartikulasikan rasa duka menjadi bentuk perjuangan kolektif. Hal ini menunjukkan bagaimana ritus keagamaan dapat memainkan peran penting dalam dinamika kekuasaan, terutama dalam situasi krisis politik dan perubahan sosial.

5. Dasteh Azadari sebagai Demonstrasi Muharram 1978

Dasteh Azadari, sebuah ritual arak-arakan duka dalam peringatan Asyura oleh komunitas Syiah Iran, mengalami transformasi signifikan menjelang Revolusi Islam 1979. Awalnya bersifat spiritual dan simbolis sebagai bentuk penghormatan atas kesyahidan Imam Husain, ritual ini pada tahun 1978 berkembang menjadi medium politik yang menyatukan ekspresi keagamaan dengan perlawanan terhadap kekuasaan otoriter Reza Pahlavi. Perubahan fungsi ini mencerminkan bagaimana elemen religius dapat dimobilisasi menjadi instrumen perjuangan sosial-politik dalam menghadapi ketidakadilan struktural (Golshan Roghani, 1991).

Ketegangan sosial yang dipicu oleh kebijakan modernisasi dan sekularisasi Revolusi Putih menciptakan akumulasi kekecewaan di kalangan ulama, buruh, mahasiswa, dan rakyat umum. Ketika bulan Muharram 1978 tiba, momentum ini digunakan oleh kelompok revolusioner untuk menyebarkan narasi Karbala sebagai metafora perjuangan rakyat Iran. Figur Imam Husain dikonstruksi sebagai simbol perlawanan, sementara Shah Reza Pahlavi diasosiasikan dengan Yazid, penguasa tiran dalam sejarah Islam (Rosenfeld, 2011).

Puncaknya terjadi pada tanggal 2 dan 11 Desember 1978 (Tasu'a dan Asyura), ketika jutaan rakyat Iran turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar dalam sejarah negara tersebut. Di Teheran saja, lebih dari dua juta orang berkumpul dalam satu prosesi yang menyerupai ritual Dasteh Azadari, diselingi dengan slogan-slogan politik seperti "Marg bar Shah." Demonstrasi ini menggabungkan dimensi spiritual, simbolik, dan politis secara bersamaan. Para korban jiwa dalam aksi protes bahkan dimaknai sebagai syuhada baru dalam narasi revolusioner.

Peristiwa serupa terjadi di banyak kota lain, termasuk Damghan, di mana warga memanfaatkan bulan Muharram untuk mengusir pasukan SAVAK dan memvisualisasikan kota mereka sebagai Karbala kontemporer. Aksi tersebut mengukuhkan Muharram sebagai ruang sakral yang diklaim ulang oleh rakyat untuk menyuarakan penderitaan, perlawanan, dan pembebasan. Penggunaan simbol dan ritus keagamaan ini menciptakan ruang artikulasi yang kuat dalam merebut kembali makna nasionalisme dari tangan negara otoriter (Golshan Roghani, 1991).

Dalam kerangka teori Michel Foucault, peristiwa Dasteh Azadari pada Muharram 1978 memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui represi dari atas, melainkan juga diproduksi dan disebarkan melalui praktik budaya dan sosial dari bawah. Ketika negara berusaha mendepolitisasi ritual keagamaan, masyarakat justru merebutnya kembali sebagai alat produksi makna dan identitas kolektif yang menantang dominasi wacana negara. Jalanan berubah menjadi panggung simbolik dan spiritual, tempat rakyat memainkan ritus perlawanan terhadap rezim (Foucault, 1980).

Lebih lanjut, konsep *power/knowledge* menjelaskan bagaimana pengetahuan religius tentang pengorbanan Imam Husain dimanfaatkan secara aktif sebagai kekuatan politik dan moral yang produktif. Melalui khutbah, majelis, slogan, dan arak-arakan, rakyat membentuk jaringan resistensi yang berbasis simbolisme Karbala. Di sini, Dasteh Azadari bukan hanya sebuah demonstrasi, melainkan juga wacana tandingan yang menciptakan distribusi kekuasaan baru di ruang publik.

Dengan demikian, demonstrasi Muharram 1978 melalui Dasteh Azadari menjadi titik balik dalam Revolusi Islam Iran. Ia bukan sekadar bentuk protes politik, tetapi merupakan ritual kolektif yang menghidupkan kembali memori spiritual menjadi energi sosial revolusioner. Dalam waktu dua bulan setelah puncaknya, Reza Pahlavi tumbang dan Republik Islam lahir. Peristiwa ini membuktikan bahwa ritus keagamaan dalam konteks Iran memiliki kekuatan transformatif yang mampu menggulingkan struktur kekuasaan negara dan membentuk sistem sosial-politik

yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan represif Muhammad Reza Pahlavi selama masa pemerintahannya (1941-1979) menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan ritual Asyura sebagai sarana perlawanan oleh masyarakat Syiah di Iran. Rezim Pahlavi menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter dan represif melalui pembentukan aparat keamanan seperti SAVAK, pembentukan Partai Rastakhiz, serta penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Selain itu, proyek sistematis modernisasi dan sekularisasi diwujudkan dalam program Revolusi Putih, pemberian hak pilih kepada perempuan, penangkapan ulama, pelarangan khutbah politik, marginalisasi institusi keagamaan, dan pembatasan ekspresi spiritual. Tindakan simbolik seperti propaganda anti-Khomeini dan pemberlakuan Undang-Undang Kapitulasi juga mencederai identitas Islam-Syiah masyarakat Iran.

Dalam konteks represi ini, ritual Asyura mengalami transformasi dari sekadar peringatan keagamaan menjadi sarana perlawanan yang konkret terhadap kekuasaan negara. Praktik *Rowzeh Khavani* berfungsi sebagai ceramah keagamaan yang memuat kritik implisit terhadap rezim, *Majelis Ta'zih* menjadi teater resistensi yang menampilkan penderitaan Imam Husain sebagai refleksi penindasan rakyat dan slogan-slogan Asyura seperti "Setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala" berfungsi sebagai alat mobilisasi identitas perlawanan. Sementara itu, *Shinehzani* memperkuat solidaritas kolektif melalui ekspresi duka yang masif dan demonstratif, sedangkan *Dasteh Azadari* berkembang menjadi ruang demonstrasi terbuka pada tahun 1978, menunjukkan bahwa ritual keagamaan dapat berkembang menjadi aksi politik yang terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamian Ervand. (2008). *A History of Modern Iran*. Cambridge University Press.
- Aghaie, K. S. (2004). Martyrs of Karbala: Shi'i symbols and rituals in modern Iran. In *Martyrs of Karbala: Shi'i Symbols and Rituals in Modern Iran*. University of Washington Press.
- Fatimah, S. (2007). *Tranformasi Peringatan Asyura Dalam Revolusi Islam Iran -Studi Sejarah Peringatan Asyura di Iran-* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=110703&lokasi=lokal>
- Fauzi, I. (2011). "Tiap Hari Asyura, Tiap Bulan Muharram": Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi'ah. *Forum Muda Paramadina*, 72(1), 83-96. <https://media.neliti.com/media/publications/776-ID-tiap-hari-asyura-tiap-bulan-muharram-paradigma-karbala-dan-protes-politik-kaum-s.pdf>
- Foucault, M. (1972). *The Archeology of Knowledge and The Discourse on Language*. London: Tavistock Publication. 2001, 1-254.
- Foucault, M. (1980). The history of sexuality. In *Neuropsychopharmacologia Hungarica : a Magyar Pszichofarmakológiai Egyesület lapja = official journal of the Hungarian Association of Psychopharmacology*.
- Foucault, M. (1990). The History of Sexuality. In *Foucault's "History of Sexuality Volume I, The Will to Knowledge": Vol. I*. <https://doi.org/10.1515/9780748648917>
- Golshan Roghani, J. (1991). *The incident of the 11th of Muharram 1978 in Damghan city*. <https://archive.org/details/shahiconfidentia0000alam/page/n5/mode/2up>
- Jerry D. Gray. (2007). *Demokrasi Barbar Ala Amerika* (Vol. 1).
- Khomeini, I. (1995). *The Ashura Uprising in the Words & Messages of Imam Khomeini*. The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works (International Affairs Department).
- Mohammadi, F. (2013). *Ashura Rituals : A Tool for Freedom or Oppression ? A Critical Examination*

- of the Ashura Rituals of Shia Islam in Regards to.* 41, 131–144.
- Mundzir, C. (2020). Dimensi Islam dan Politik: Telaah Historis atas Revolusi Iran 1979. *Jurnal Al-Hikmah*, 31–46. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2>.
- Nematollahi Mahani, M. A. (2013). The holy drama. Persian passion play in modern Iran. *The Holy Drama. Persian Passion Play in Modern Iran*. https://doi.org/10.26530/oopen_595094
- Partow, N. (2014). Martyrdom and Legacy of Blood: A Case Study in Iran. *Contemporary Review of the Middle East*, 1(2), 165–188. <https://doi.org/10.1177/2347798914532729>
- Pramono, B. (2017). Perubahan Politik oleh Faktor Agama. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 13(1), 1976–1992. https://doi.org/10.1007/978-1-349-00406-5_6
- Rosenfeld, E. (2011). *Muharram Protests in Iran, 1978*. https://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080036_2080037_2080043,00.html
- Sahimi, M. (2009). *Ashura* 101. <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/12/december-18-marked-the-beginning.html>
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.30742/juisspol.v1i1.1560>
- Wagner, H. L. (2010). *The Iranian Revolution*. New York: Chelsea House. <https://archive.org/details/iranianrevolutio0000wagn/page/38/mode/2up>
- Zein, A. M., Alhadi, H., Kurnia, M. E. R., & Jahan, M. T. S. (2024). Pengaruh Revolusi Iran Terhadap Kondisi Hubungan Luar Negeri Iran Pada Tahun 1978-1980. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 196–202.